

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Peneliti lain yang mampu memberikan acuan untuk penelitian ini, sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti, di antaranya:

##### **1. Ni Nyoman Alit Triani., *et al* (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Objek penelitian ini adalah kesesuaian pengelolaan keuangan dana desa dengan peraturan yang berlaku. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepada warga dan pemimpin Desa Plosogeneng, Donowarih, dan Pesantren sehingga ada kepala desa, pejabat pembuat laporan, dan masyarakat umum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang terdiri dari *reduction data*, *display data*, dan *conclusion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan beberapa desa di Jawa Timur telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Aspek transparansi penggunaan Dana

Desa telah dipenuhi hampir seluruh desa di Jawa Timur yang dibuktikan dengan pemasangan baliho di tempat strategis. Baliho tersebut berisikan informasi tentang APB Desa masing-masing. Selain itu adanya prasasti atau papan informasi tentang bukti pembangunan Desa. Setiap desa didampingi tenaga pendamping desa untuk membantu administrasi pengelolaan Dana Desa.

### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terkait:

1. Tahap analisis yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki kesamaan yaitu dimulai dari *reduction data*, *display data*, sampai dengan *conclusion*.
2. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu unsur transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD).

### **Perbedaan**

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yang terletak pada :

1. Lingkup penelitian terdahulu adalah beberapa desa di Jawa Timur, sedangkan penelitian saat ini hanya satu lingkup desa yaitu Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

2. Informan yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan unsur masyarakat umum seperti dari Pesantren, sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan informan dari perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

## 2. **Elma Julita (2018)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Pemerintah di Sungai Ara dan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa serta penyelesaian dari kendala dalam pengelolaan Dana Desa di Sungai Ara tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode analisa data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan DD di Sungai Ara tahun 2016, mulai tahap perencanaan Dana Desa telah sesuai dengan peraturan pengelolaan DD. Proses perencanaan terlihat adanya penerapan prinsip transparansi dan partisipatif. Pada tahap pelaksanaan terlihat adanya hambatan. Hambatan tersebut di antaranya adalah tidak mengertinya perangkat Desa terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing, miskomunikasi atau kurangnya komunikasi antar sesama anggota oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan mengalami kendala dikarenakan kondisi alam (banjir), tidak selesainya pembangunan yang dilakukan, dan keterlambatan transfer DD dari Kabupaten.

Dalam hal penatausahaannya Dana Desa telah dilaporkan setiap bulannya kepada Kepala Desa. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban dalam

pengelolaan anggaran Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sungai Ara masih belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dimana pemerintah Desa belum mampu untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terkait:

1. Unsur keuangan yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu membahas Dana Desa (DD) dari ABPN di lingkup satu Desa.
2. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD).

### **Perbedaan**

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yang terletak pada :

1. Tahapan pengelolaan Dana Desa (DD) yang digunakan oleh penelitian terdahulu ada 5 (lima) tahap beserta hambatannya, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 4 (empat) tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Perundang-undangan atau pedoman pengelolaan Dana Desa yang di-

gunakan oleh penelitian terdahulu adalah Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **3. Feiby Vencentia Tangkumahat (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Dana Desa (DD), khususnya pada proses penerapan Dana Desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Jumlah respondennya adalah 70 (tujuh puluh) orang, setiap desa diambil 10 (sepuluh) orang yang berasal dari Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa di tujuh desa yaitu Sea, Sea Satu, Warembungan, Pineleng Dua Indah, Kali, Kali Selatan dan Winangun Atas. Implementasi dari program Dana Desa (DD) menjadi titik fokus atau objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa program Dana Desa di Kecamatan Pineleng yang berlangsung sejak tahun 2015 telah sesuai dengan kebijakan Nasional Pemerintah Pusat. Bagi 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Pineleng penyusunan rencana kegiatan Dana Desa telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan melibatkan masyarakat. Secara umum, proses pelaksanaan kegiatan dengan program DD telah berjalan dan sesuai dengan hasil DRUK, namun masih ada beberapa kendala. Kendala yang dialami antara lain program kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya, dana yang terlambat dicairkan atau ditransfer oleh Pemerintah Kabupaten, TPK yang belum mengerti akan tugas dan

tanggung jawab masing-masing, faktor SDM yang masih lemah, serta masih minimnya pengetahuan dan ketrampilan dari PTPKD.

Kendala di atas menyebabkan aspek pertanggungjawaban keuangan sering kali terlambat disampaikan. Meskipun demikian, Pemerintah Desa selalu mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana desa yang bersumber dari Dana desa dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pemerintah Desa juga memberikan sosialisasi pertanggungjawaban penggunaan DD.

### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terkait:

1. Tahap analisis yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki kesamaan yaitu dimulai dari *reduction data*, *display data*, sampai dengan *conclusion*.
2. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD).

### **Perbedaan**

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yang terletak pada :

1. Lingkup penelitian terdahulu adalah desa secara keseluruhan dalam satu Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi

Utara, sedangkan penelitian saat ini hanya satu lingkup desa yaitu Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.

2. Tahapan pengelolaan Dana Desa yang digunakan oleh penelitian terdahulu ada 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 4 (empat) tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

**4. Inten Meutia & Liliana (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Objek dalam penelitian ini adalah menganalisis implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) serta keterkaitannya dengan kemandirian pangan serta Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Ada 26 orang informan dengan latar belakang pendidikan mereka setingkat SD sampai dengan S2.

Teknik analisis data akan dilakukan dengan proses deskripsi kuantitatif dan kualitatif. Analisis yang dilakukan proses kualitatif yang dimaksud adalah analisis data interaktif yang terdiri dari *reduction data*, *display data*, dan *conclusion*. Berbeda dengan analisis kualitatif, analisis kuantitatifnya menggunakan frekuensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113/2014. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap mulai perencanaan, penganggar-

an, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai pengawasan telah dilaksanakan dan semakin banyak desa yang mampu serta patuh terhadap aturan penyusunan sistem keuangan desa tersebut.

Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa Desa, dikarenakan adanya keterbatasan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Ada beberapa hambatan yang mengakibatkan ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan sehingga tidak memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat desa dalam pembangunan.

### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terkait:

1. Tahap analisis yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki kesamaan yaitu dimulai dari *reduction data*, *display data*, sampai dengan *conclusion*.
2. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **Perbedaan**

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yang terletak pada:



1. Lingkup penelitian terdahulu adalah desa secara keseluruhan dalam satu Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, sedangkan penelitian saat ini hanya satu lingkup desa yaitu Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
2. Pedoman pengelolaan keuangan desa penelitian terdahulu yang digunakan hanya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan penelitian saat ini menggunakan beberapa pedoman tentang pengelolaan keuangan Desa mulai Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 sampai dengan Perbup Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018.

5. **Nurul Hidayah & Iin Wijayanti (2017)**

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) yang dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Objek penelitiannya adalah akuntabilitas tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang dimulai dengan *reduction data*, *display data*, dan *conclusion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa (DD) pada Pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Hal ini terlihat dengan tingginya kesadaran masyarakat Desa dalam mengambil keputusan serta mempunyai peran aktif dalam pengelolaan pembangunan. Hal yang berbeda terlihat pada tahap

pelaksanaan Dana Desa (DD) Pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi, karena Kepala Desa Wonodadi masih belum terbuka terhadap masyarakat untuk informasi pengelolaan keuangan Desa. Hal ini dilakukan karena memang itu adalah amanat dari atasan atau pemerintah Kabupaten.

Dalam aspek pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa Wonodadi sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan dana Desa. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban masih mengalami kesulitan.

### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terkait:

1. Tahap analisis yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki kesamaan yaitu dimulai dari *reduction data*, *display data*, sampai dengan *conclusion*.
2. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa (DD).
3. Anggaran yang menjadi fokus pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu hanya berpusat

pada dengan pengelolaan keuangan Dana Desa (DD).

### Perbedaan

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yang terletak pada :

1. Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu berada di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, sedangkan penelitian saat ini menggunakan hanya satu Desa yaitu Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
2. Informan yang digunakan oleh penelitian terdahulu hanya Kepala Desa, sedangkan penelitian saat ini menggunakan 4 (empat) informan dari Pemerintahan Desa yang bersangkutan langsung dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan 2 (dua) dari masyarakat Desa.

### 6. **Khuswatun Chasanah., et al (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Pemerintah Desa Gumelem Kulon yang meliputi Kepala Desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan Sekretaris Desa sebagai koordinator program, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat dan pendamping Desa yang bertugas di wilayah Kecamatan Susukan.

Metode analisis data menggunakan model analisis interaktif untuk mewujudkan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi, baik menggunakan triangulasi sumber, metode, maupun data. Hasil penelitian terkait dengan informasi DD dan penyebarannya kepada masyarakat menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi DD menggunakan beberapa media. **Pertama**, penyebarluasan informasi DD melalui forum resmi di tingkat Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Aparat Desa, serta Ketua dan anggota BPD. **Kedua**, penyebarluasan informasi DD melalui forum tidak resmi namun terjadwal secara periodik di tingkat desa. *Songolasan* merupakan forum tidak resmi yang dimaksud dan merupakan tradisi Desa Gumelem Kulon yang dilaksanakan setiap tanggal 19 bertempat di Balai Desa. *Songolasan* bertujuan untuk menyebarkan informasi dan menjaring aspirasi masyarakat. **Ketiga**, melalui forum tidak resmi dan tidak terjadwal di tingkat Desa berbentuk majelis pengajian. **Keempat**, penyebarluasan informasi melalui papan informasi kegiatan.

Dari pemenuhan aspek akuntabilitas Pemerintah Desa Gumelem Kulon telah melaksanakan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa secara horisontal maupun vertikal. Secara horisontal melaporkan kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat, dan secara vertikal melaporkan kepada Bupati melalui Camat. Kendala akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD) tampak pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang belum terpenuhi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, serta kemampuan penggunaan teknologi informasi yang belum maksimal. Kendala lainnya disebabkan oleh belum ada petunjuk teknis tentang administrasi dan pelaporan pengelolaan Dana Desa pada 2 tahun

pertama pelaksanaan kebijakan Dana Desa (DD) sehingga diperlukan pendampingan bagi para implementor di tingkat Desa.

### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terkait:

1. Tahap analisis yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki kesamaan yaitu dimulai dari *reduction data*, *display data*, sampai dengan *conclusion*.
2. Teknik keabsahan data yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki kesamaan yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan data.
3. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu implementasi atau mekanisme Perangkat Desa terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa (DD).

### **Perbedaan**

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yang terletak pada :

1. Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu berada di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara, sedangkan penelitian

saat ini menggunakan hanya satu desa yaitu Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.

2. Unsur yang digunakan untuk menggambarkan transparansi peneliti terdahulu dilihat dari akses atau media yang digunakan dalam memberikan informasi, sedangkan penelitian saat ini ditinjau dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dan penggunaan media yang ada.

7. **Mustazir Ramli (2016)**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme dan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta menggambarkan bagaimana kapasitas dari Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa dengan studi kasus pada Pemerintah Gampong Harapan Kota Lhokseumawe. Pemilihan Gampong Harapan digunakan sebagai objek penelitian, dikarenakan Gampong pernah mendapatkan predikat terbaik atas pengelolaan keuangan berdasarkan penilaian dan evaluasi dari tim BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat) sebelum adanya UU Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Informan telah ditentukan secara *purposive sampling* meliputi aparatur Pemerintah Gampong Harapan dan Tim dari BPM sebagai pendamping Pemerintahan Gampong, selanjutnya Tuha Peut dan Auditor juga di wawancarai guna mendapatkan pemahaman tentang fungsi pengawasan pada tingkat pemerintahan Gampong. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode

analisis data interaktif yang terdiri dari tahap reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa: **Pertama**, mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Gampong Harapan sudah berjalan dengan baik. Secara vertikal kegiatan pertanggungjawaban Gampong Harapan kepada Walikota Lhokseumawe menggunakan Qanum pertanggungjawaban APBG, sedangkan kepada BPM menggunakan laporan keuangan. Secara horizontal kegiatan pertanggungjawaban Gampong Harapan dilakukan kepada Tuha Peut yang melibatkan masyarakat Gampong di dalam sebuah musyawarah Gampong. Pertanggungjawaban juga dilakukan dengan cara menempelkan pengumuman agar memudahkan masyarakat mengakses informasi tersebut.

**Kedua**, kapasitas Pemerintah Gampong Harapan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa dirasakan sangat bagus. Kinerja Pemerintah Gampong Harapan dalam mempertanggungjawabkan keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik karena didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten baik dalam ilmu administrasi dan akuntansi.

### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terkait:

1. Tahap analisis yang digunakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang memiliki kesamaan yaitu dimulai dari *reduction data*,

*display data*, sampai dengan *conclusion*.

2. Objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki kesamaan yaitu proses atau mekanisme akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

### **Perbedaan**

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yang terletak pada :

1. Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu berada di Gampong Harapan Kota Lhokseumawe, sedangkan penelitian saat ini di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
2. Fokus penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pengelolaan keuangan secara keseluruhan, sedangkan penelitian saat ini hanya berfokuskan pengelolaan Dana Desa (DD).

### **8. Ni Wayan Rustiarini (2016)**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan implementasi *good governance* dalam praktik pengelolaan Dana Desa. Obyek yang dianalisis adalah pemahaman pihak-pihak yang terkait mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa (DD). Informan yang dipilih adalah individu yang terlibat langsung, memahami, dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa (DD) yang ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu kepada Sanders (1982)



No	Informan (inisial)	Bidang Pekerjaan
1.	KK	Kepala Desa M
2.	WD	Kepala Desa K
3.	GK	Bendahara Desa B
4.	GP	Anggota DPRD Provinsi
5.	NS	Anggota DPRD Kabupaten
6.	AY	Dosen Akuntansi Sektor Publik
7.	BM	Auditor KAP

Sumber: Ni Wayan (2016)

Tabel 2.1.  
INFORMAN PENELITIAN

dan Rahayu (2007) yang membagi dalam empat tahapan yaitu: (1) mendeskripsikan fenomena, (2) mengidentifikasi tema-tema, (3) mengembangkan *noetic/noematic correlates*, dan (4) mengabstraksikan intisari atau universals dari *noetic/noematic correlates*. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bentuk partisipasi aktif masyarakat diwujudkan melalui kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. Fenomena ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabel seperti yang termaktub dalam konsep *good governance*.

Banyak Kepala Desa tidak menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam membuat laporan realisasi yang ditunjukkan setiap musyawarah. Mekanisme pembuatan laporan pertanggung-jawaban masih sebatas formalitas untuk memenuhi tanggungjawab pada pemerintah pusat. Dalam hal ini penerapan *good governance* dalam pengelolaan Dana Desa terlihat masih ada ketidaksiapan sumber daya yang berkualitas.

### Persamaan

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mengenai pengelola keuangan khususnya pengelolaan Dana Desa (DD).

### Perbedaan

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yang terletak pada :

1. Penelitian terdahulu menggunakan lingkup seluruh desa di Provinsi Bali, sedangkan penelitian saat ini menggunakan satu lingkup Pemerintah Desa.
2. Teknik analisis data yang digunakan penelitian terdahulu ada 4 (empat) tahap yang terdiri dari (1) mendeskripsikan fenomena, (2) mengidentifikasikan tema-tema, (3) mengembangkan *noetic/noematic correlates*, dan (4) mengabstraksikan intisari atau universals dari *noetic/noematic correlates*, sedangkan penelitian saat ini menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahap yaitu *reduction data*, *display data*, dan *Conclusions Drawing*.

### 9. Thomas Ahrens (2015)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan akuntabilitas baru antara *Newcastle City Council* (NCC) dan warga negara serta pemangku kepentingan yang dibangun dari Pemerintah Inggris terkait mengurangi

politik dan pemotongan anggaran untuk pemerintah daerah. Informan penelitian ini adalah petugas dewan, para aktivis, dan warga. Selain wawancara juga dilakukan dengan analisis dewan dan dokumen lainnya, dan pengamatan pertemuan publik dan demonstrasi. Objek penelitiannya adalah hubungan antara Kota *Political Grassroots*, kepemimpinan NCC dan administrasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Politisi Senior NCC dan Perwira memilih Kota *Political Grassroots* dan berhasil menyusun kembali akuntabilitas politik lokal untuk warga. Para pemangku kepentingan sebagai pilihan untuk menghentikan berbagai jenis layanan Pemerintah Daerah dengan menggabungkan perbandingan kerangka hukum dari otoritas lokal Inggris, ketidakadilan politik nasional, dan kewajiban penyediaan layanan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berusaha untuk mendorong tanggung jawab untuk pemotongan dengan warga lokal, sementara mediator dan juri yang membuat keputusan akhir tentang portofolio penyebab yang akan didanai.

### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mengenai akuntabilitas dari Pemerintah Daerah.

### **Perbedaan**

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yang terletak pada akuntabilitas Pemerintah ketika Pemilu, sedangkan penelitian

saat ini mengungkapkan akuntabilitas Pemerintah tentang anggaran bantuan.

**10. Indera Radzuan Syahrul Mat., *et al* (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan program insentif yang diformulasikan untuk masyarakat telah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga setempat. Informan pada penelitian ini adalah penduduk lokal di tiga lokasi, yaitu Desa Bukchon Hanok yang terletak di Kota Seoul, Desa Hahoe di Angdong dan Desa Yangdong di Gyeongju. Objek penelitian ini adalah mencoba menganalisis warga tentang persepsi efektivitas kebijakan Pemerintah Provinsi Gyeongbuk-do. Metode analisis yang digunakan adalah metode campuran desain triangulasi yang dilakukan bersamaan dengan melakukan *review* dokumen, observasi, wawancara terstruktur dan survei.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan untuk program insentif saat ini harus mencerminkan secara visual “kenyataan” kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar dari dukungan dan bantuan keuangan pelestarian disediakan oleh otoritas Korea agar pemilik properti bersejarah dapat melestarikan Desa warisan mereka tanpa mereka sadari satu hari akan “menghilang”. Ada dampak negatif yang dirasakan selain dampak positif dari dukungan dan bantuan keuangan untuk pelestarian Desa bersejarah di Korea. Dari pariwisata kepada penduduk setempat telah muncul sebagai pusat kegelisahan mereka dan alat-alat insentif keuangan belum cukup berfokuskan untuk menyesuaikan diri dengan efektivitas program konservasi.

Penelitian ini menemukan bahwa adanya daya tarik yang berbeda antara kebijakan insentif saat ini dan aspirasi lokal. Kebanyakan kasus menemukan konservasi warisan budaya yang ditemukan untuk menjadi katapitalis dalam memenuhi keuntungan pariwisata warisan daripada kondisi kebutuhan masyarakat setempat. Adanya kebutuhan yang pasti bagi Pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk membangun kembali pendekatan masyarakat partisipatif dalam setiap proses pengambilan keputusan.

#### **Persamaan**

Terdapat persamaan antara antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yaitu terkait objek penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini mengenai dana bantuan dari Pemerintah.

#### **Perbedaan**

Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan datang (penelitian sekarang) yaitu penelitian terdahulu mengungkapkan realisasi dana bantuan untuk Desa bersejarah, sedangkan penelitian saat ini mengungkapkan realisasi dana bantuan dari Pemerintah yang menyuluruh untuk pembangunan Desa yang merata.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara

manajer (*agents*) dengan pemilik (*principals*). Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada Manajer. Hubungan keagenan adalah pihak *principals* yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada dasarnya sebenarnya teori agensi telah dipraktikkan di lingkungan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Pada organisasi sektor publik yang sebagai *principals* adalah rakyat sedangkan *agent* adalah Pemerintah. Lingkup hubungan antara *agent* dan *principals* yang akan dibahas adalah hubungan antara Pemerintah Desa Mlirip dengan masyarakat Desa Mlirip.

Menurut Mardiasmo (2002:20-22) menyatakan, bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) kepada pemberi amanah (*principal*) untuk memberikan pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah kewajiban Kepala Desa dan aparatnya sebagai agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kepala Desa dan aparatnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan masyarakat Desa kepada Lembaga pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Transparansi merupakan bentuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, *dkk* 2016). Aparat Pemerintahan dalam mengelola Pemerintahan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu organisasi atau Pemerintahan. Perilaku dari Aparat Pemerintahan yang bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri bukanlah sesuatu hal yang patut dipuji atau dibenarkan. Tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai Aparat Pemerintah adalah memihak kepada kepentingan rakyatnya, karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa Aparat Pemerintah untuk menjalankan Pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (DD) adalah Pemerintah Desa bisa melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan APB Desa yang telah ditetapkan yang merupakan usulan dari masyarakat Desa.

### **2.2.2. Pengertian Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem

Pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sebuah kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (V. Wiratna, 2015). Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa tahun 2014 pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, adalah:

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengertian lain mengatakan Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo, 2010 : 28). Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan Desa di Indonesia dibagi dalam 3 (tiga) jenis Desa yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya, dan Desa Swasembada. Desa Swadaya yaitu Desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional.

Pengaturan suatu Desa harus berasaskan rekognisi, subsidiaritas, ke-



beragaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Tujuan diadakannya pengaturan Desa adalah:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa,
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama,
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab,
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional,
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar-Desa.

Kedudukan Desa berada di dalam suatu wilayah Kabupaten atau Kota. Pendapat lain dari UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa terdiri dari dua jenis yaitu Desa dan Desa Adat serta penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah tersebut. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan tersebut meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. Penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi

Desa. Ada bagian terkecil yang berada dalam wilayah Desa, yaitu dengan dibentuknya Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa tersebut. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan yang merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun dan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi. Suatu Desa juga dapat dihapuskan karena terjadinya bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.

Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Perubahan status dari Desa menjadi kelurahan juga bisa dilakukan, namun perubahan tersebut berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa (Musdes) dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa. Ketentuan jika status Desa berubah menjadi Kelurahan maka seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut. Pendanaan di Kelurahan akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Desa diberikan kewenangan yang mencakup kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan penugasan tersebut disertai dengan biaya.

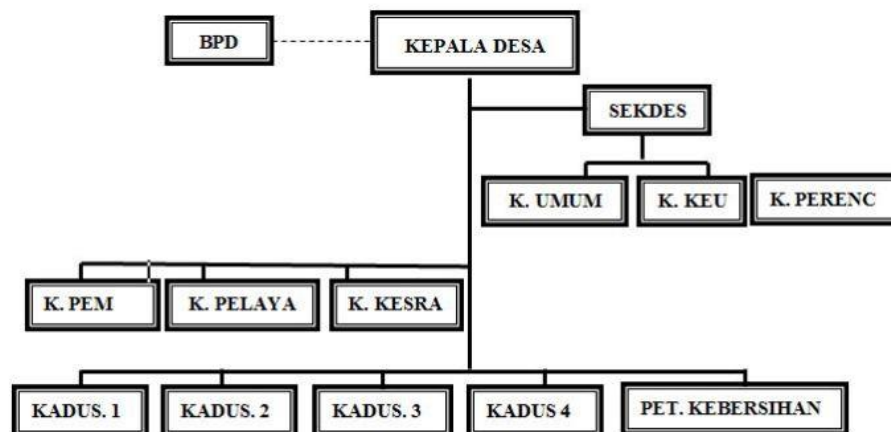
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan, bahwa masyarakat pada tingkat desa dapat digolongkan dalam tiga jenis institusi, antara lain: (1) Pemerintah Desa merupakan unsur pelaksana berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. (3) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintah serta

dalam rangka mengembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya (Widjaja, 2005:94).

### **2.2.3. Struktur Pemerintah Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Desa, Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus berdasarkan asas-asas seperti asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu dengan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Perangkat Desa ini berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015), Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Gambar 2.1 berikut ini merupakan gambaran struktur organisasi Pemerintah Desa.



Sumber: V. Wiratna Sujarweni (2015)

Gambar 2.1.  
STRUKTUR PEMERINTAH DESA

### Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Salah satu Lembaga masyarakat yang masuk ke dalam Pemerintahan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No.6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Desa). Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan, bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Wilayah yang dimaksudkan merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun, RW atau RT.

Jumlah anggota BPD paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan

Keuangan Desa. Kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. Kelembagaan BPD berdasarkan bidang terdiri dari bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan serta bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fungsi Lembaga BPD adalah sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas dari Lembaga BPD mempunyai yaitu:

1. Menggali aspirasi masyarakat;
2. Menampung aspirasi masyarakat;
3. Mengelola aspirasi masyarakat;
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kepala Desa**

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki wewenang untuk:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa,
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa,
4. Menetapkan Peraturan Desa,
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa),
6. Membina kehidupan masyarakat Desa,
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa,
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,



9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa,
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa,
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif,
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi seperti menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga hubungan kemitraan dengan Lembaga masyarakat dan Lembaga lainnya. Menurut Pemerndagri Nomor 112 Tentang Pemilihan Kepala Desa menjelaskan, bahwa tatacara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan penetapan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bisa satu kali atau beberapa gelombang. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
2. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Pada tahap persiapan pemilihan Kepala Desa, BPD akan memberitahu Kepala Desa akhir masa jabatan pada 6 (enam) bulan terakhir sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir. BPD akan membentuk panitian pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Panitia

pemilihan Kepala Desa harus bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya panitia pemilihan. Persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh panitia. Kepala Desa akan dipilih langsung oleh penduduk Desa dan pemilihan tersebut bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Biaya atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

#### **Sekretaris Desa (Sekdes)**

Sekretaris Desa merupakan pimpinan dalam unsur sekretariat desa yang dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa mempunyai fungsi dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan umum, urusan keuangan, dan melaksanakan perencanaan (Permendagri No.113 Tahun 2015). Menurut V. Ratna Sujarweni (2015) Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan

administrasi desa, mempersiapkan bahan Penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. Fungsi Sekretaris Desa adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa;
2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
3. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2015, unsur staf sekretariat Desa yang membantu tugas Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepala Urusan.

#### **Kepala Urusan (Kaur)**

Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan

kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPB Desa), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan *monitoring* dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)**

Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun memiliki fungsi antara lain;

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **Pelaksana Teknis (Kepala Seksi)**

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

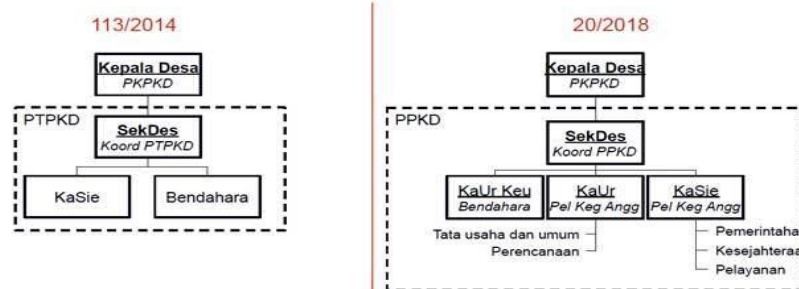
Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

#### **Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD)**

Selain mengatur dan menjalankan program Pemerintah menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, menyatakan bahwa Kepala Desa juga melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Istilah PTPKD telah berubah sekarang istilah tersebut berganti sebagai PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) dan tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Permendagri No.113/2014 struktur pelaksana pengelolaan keuangan Desa terdiri dari Kepala Desa dengan PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), dan Bendahara Desa. Perubahan struktur pelaksana pengelola keuangan Desa dalam Permendagri No.20/2018 terdiri dari Kepala Desa dan PPKD yang meliputi Sekretaris Desa

(Sekdes), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi. Perbedaan struktur ini digambarkan dalam Gambar 2.2. berikut ini.

### Pengelola Keuangan Desa



Sumber: Permendagri No.113/2014 dan Permendagri No.20/2018

Gambar 2.2  
STRUKTUR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Desa. Salah satu unsur pembantu Kepala Desa adalah Sekretaris Desa. Tindakan untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja Perangkat Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa adalah dengan mengadopsi keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM dimulai pada tahun 2007.

Pendampingan Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan/atau Pendamping pihak ketiga (Permendes, PDT, & Transmigrasi No.19/2017). Selain



pendampingan ada juga pembinaan dan pengawasan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Camat.

#### **2.2.4. Dana Desa (DD)**

Keuangan Desa Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 tentang Keuangan Desa menyatakan bahwa, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”

Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan adalah hal yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (UU No.6/2014). Pendapatan Desa yang dimaksudkan adalah segala sesuatu pemasukan ke rekening Desa yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa,
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota,
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota,

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota),
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Salah satu dana bantuan dari Pemerintah yang berasal dari alokasi APBN adalah Dana Desa (DD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 adalah sebagai berikut,

Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa (DD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan DD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Pernyataan tersebut dipertegas pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 Pasal 25, yaitu Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dana Desa (DD) dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Pengalokasian DD dihitung berdasarkan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan indeks kelemahan konstruksi merupakan data yang digunakan dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Besaran pagu Dana Desa (DD) secara nasional untuk mendapatkan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$$\text{Pagu Dana Desa Kabupaten/Kota} = \text{APBN} \times [ (30\% \times \% \text{ jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap total penduduk nasional}) + (20\% \times \% \text{ luas wilayah Kabupaten/Kota terhadap total luas wilayah nasional}) + (50\% \times \% \text{ jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk miskin nasional}) ] \dots\dots\dots (1)$$

Hasil dari pagu Dana Desa (DD) untuk Kabupaten/Kota maka akan bisa menentukan besaran pagu Dana Desa (DD) untuk setiap Desa. Perhitungan pagu Dana Desa (DD) untuk setiap Desa adalah dengan mengkalikan hasil pagu Dana Desa (DD) untuk Kabupaten/Kota dengan indeks kemahalan konstruksi setiap Kabupaten/Kota. Besaran perolehan dana desa untuk setiap desa adalah sebagai berikut:

Dana Desa per Desa = Pagu DD Kab/Kota  $\times$  [(30%  $\times$  % jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap total penduduk nasional) + (20%  $\times$  % luas wilayah Kabupaten/Kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50%  $\times$  % jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota terhadap jumlah penduduk miskin nasional)]...

..... (2)

Menurut PMK Nomor 199 Tahun 2017, pengalokasian Dana Desa (DD) setiap Kabupaten/Kota berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

DD Kab/Kota = AD Kab/Kota + AA Kab/Kota + AF Kab/Kota ..... (3)

Keterangan:

DD Kab/Kota = Dana Desa setiap Kabupaten/Kota

AD Kab/Kota = Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota

AA Kab/Kota = Alokasi Afirmasi setiap Kabupaten/Kota

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

Jika berdasarkan Buku Saku Dana Desa tahun 2017 pada laman <https://www.kemenkeu.go.id/>, proporsi dan bobot formula dibagi menjadi 90% porsi yang dibagi rata dari Alokasi Dasar dan 10% porsi berdasarkan Alokasi Formula. Alokasi Formula didapatkan dari jumlah penduduk desa (25%), angka kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis

desa (30%). Pada tahun 2018 reformulasi pembagian Dana Desa (DD) Tahun 2018 dilakukan dengan:

1. Menurunkan pagu Alokasi Dasar yang awalnya dihitung sebesar 90% menjadi 77% dari anggaran Dana Desa (DD) dibagi secara merata kepada setiap Desa,
2. Memberikan pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% dari anggaran Dana Desa (DD) dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
3. Meningkatkan pagu Alokasi Formula yang awalnya dihitung sebesar 10% menjadi 20% dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
4. Mengubah bobot masing-masing variabel pro pada kemiskinan antara lain 10% untuk jumlah penduduk, 50% untuk angka kemiskinan, 15% untuk luas wilayah, dan 25% untuk tingkat kesulitan geografis.

Gambar 2.3 berikut ini merupakan pengalokasian Dana Desa (DD) untuk setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur menurut Buku Saku Dana Desa tahun 2018. Hasil pengalokasian DD untuk wilayah Jawa Timur dicatat berdasarkan dengan laporan dokumen yang dilaporkan pada Kementerian Keuangan. Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan

berdasarkan Alokasi Dasar setiap Desa, Alokasi Afiriasi setiap Desa, dan Alokasi Formula setiap Desa



#### Rincian Dana Desa Per Kabupaten/Kota

(ribu Rupiah)

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Alokasi Dasar Per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula	Total
<b>Total Provinsi Jawa Timur</b>	<b>7.724</b>	<b>18.490,350</b>	<b>4.760.648,780</b>	<b>200.016,560</b>	<b>1.408.080,019</b>	<b>6.368.745,359</b>
Kab. Gresik	330	616,345	203.393,850	6.029,911	36.891,367	246.315,128
Kab. Mojokerto	299	616,345	184.287,155	1.029,497	23.145,752	208.462,404
Kab. Sidoarjo	322	616,345	198.463,090	9.265,473	45.914,984	253.643,547
Kab. Jombang	302	616,345	186.136,190	8.088,905	44.269,793	238.494,888
Kab. Sampang	180	616,345	110.942,100	5.588,698	63.065,418	179.596,216
Kab. Pamekasan	178	616,345	109.709,410	7.794,763	48.432,012	165.936,185
Kab. Sumenep	330	616,345	203.393,850	11.177,396	61.738,410	276.309,656
Kab. Bangkalan	273	616,345	168.262,185	19.266,301	80.797,539	268.326,025
Kab. Bondowoso	209	616,345	128.816,105	8.677,189	59.983,637	197.476,931
Kab. Situbondo	132	616,345	81.357,540	4.853,343	29.203,924	115.414,807
Kab. Banyuwangi	189	616,345	116.489,205	9.147,485	49.957,816	175.594,506
Kab. Jember	226	616,345	139.293,970	7.794,763	90.271,305	237.360,038
Kab. Malang	378	616,345	232.978,410	11.324,467	76.037,781	320.340,658
Kab. Pasuruan	341	616,345	210.173,645	14.854,171	77.543,648	302.571,464
Kab. Probolinggo	325	616,345	200.312,125	15.883,668	108.239,539	324.435,332
Kab. Lumajang	198	616,345	122.036,310	6.471,124	35.347,672	164.055,106
Kab. Kediri	343	616,345	211.406,335	8.088,905	52.510,965	272.006,205
Kab. Tulungagung	257	616,345	158.400,665	6.029,911	41.249,703	205.680,279
Kab. Nganjuk	264	616,345	162.715,080	10.147,899	66.179,141	239.042,120
Kab. Trenggalek	152	616,345	93.684,440	3.529,704	30.613,311	127.827,455
Kab. Blitar	220	616,345	135.595,900	2.353,136	26.248,717	164.197,753
Kab. Madiun	198	616,345	122.036,310	882,426	19.962,449	142.881,185
Kab. Ngawi	213	616,345	131.281,485	4.853,343	32.438,090	168.572,918
Kab. Magetan	207	616,345	127.583,415	1.029,497	19.577,191	148.190,103
Kab. Ponorogo	281	616,345	173.192,945	4.265,059	38.851,469	216.309,473
Kab. Pacitan	166	616,345	102.313,270	1.323,639	22.866,619	126.503,528
Kab. Bojonegoro	419	616,345	258.248,555	7.206,479	52.444,148	317.899,182
Kab. Tuban	311	616,345	191.683,295	2.794,349	31.170,844	225.648,488
Kab. Lamongan	462	616,345	284.751,390	3.970,917	33.289,836	322.012,143
Kota Batu	19	616,345	11.710,555	294,142	9.636,939	21.641,636

Sumber: Buku Saku Dana Desa

Gambar 2.3  
DANA DESA (DD) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018

Besaran Alokasi Dasar setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar yang sebesar 77% dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa di daerah Kabupaten/Kota. Besaran Alokasi Afiriasi setiap Kabupaten/ Kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Kab/Kota} = (AA \text{ DST} \times \text{DST Kab/Kota}) + (AA \text{ DT} \times \text{DT Kab/Kota}) \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

AA Kab/Kota = Alokasi Afiriasi kabupaten/kota

AA DST = Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal

yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab/Kota = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

AA DT = Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab/Kota = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten/kota

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa, sedangkan untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa. Perhitungan Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = \frac{(3\% \times DD)}{\{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}} \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Perhitungan untuk besaran Dana Desa (DD) berdasarkan Alokasi Formula untuk setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Kab/Kota} = \{(10\% \times Y1) + (50\% \times Y2) + (15\% \times Y3) + (25\% \times Y4)\} \times (20\% \times DD) \dots\dots\dots (6)$$

Keterangan:

AF Kab / Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

Y1 = Rasio jumlah penduduk Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Desa nasional

Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Y3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Kabupaten/Kota terhadap total luas wilayah Desa nasional

Y4 = Rasio IKK Kabupaten/ Kota terhadap total IKK Kabupaten/ Kota yang memiliki Desa

Besaran Alokasi Formula untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(10\% \times Z1) + (50\% \times Z2) + (15\% \times Z3) + (25\% \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/ Kota} \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan:



- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk  
Desa Kabupaten/Kota
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total  
Penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas  
wilayah Desa Kabupaten/Kota
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG total Desa  
Kabupaten/Kota
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Kabupaten/Kota

Penyaluran DD diberikan langsung oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran DD dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Selanjutnya pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa dilakukan setelah APBDesa telah ditetapkan. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran DD dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan Tahap I pada bulan April sebesar 40%, Tahap II bulan Agustus sebesar 40% dan Tahap III bulan November sebesar 20% (PP No.60 Tahun 2014). Penyaluran DD setiap tahap paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima kas Daerah. Menurut Perbup Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018, pembagian Dana Desa (DD) pada Tahap I sebesar 20% disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, Tahap II

sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, dan Tahap III sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Juli.

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut,

1. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun Anggaran berjalan, dan
2. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan DD. Pemantauan dilakukan terhadap:

1. Penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa,
2. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa,
3. Penyampaian laporan realisasi, dan
4. SiLPa Dana Desa.

Evaluasi dilakukan terhadap perhitungan pembagian besaran DD setiap Desa oleh Kabupaten/Kota dan realisasi penggunaan DD.

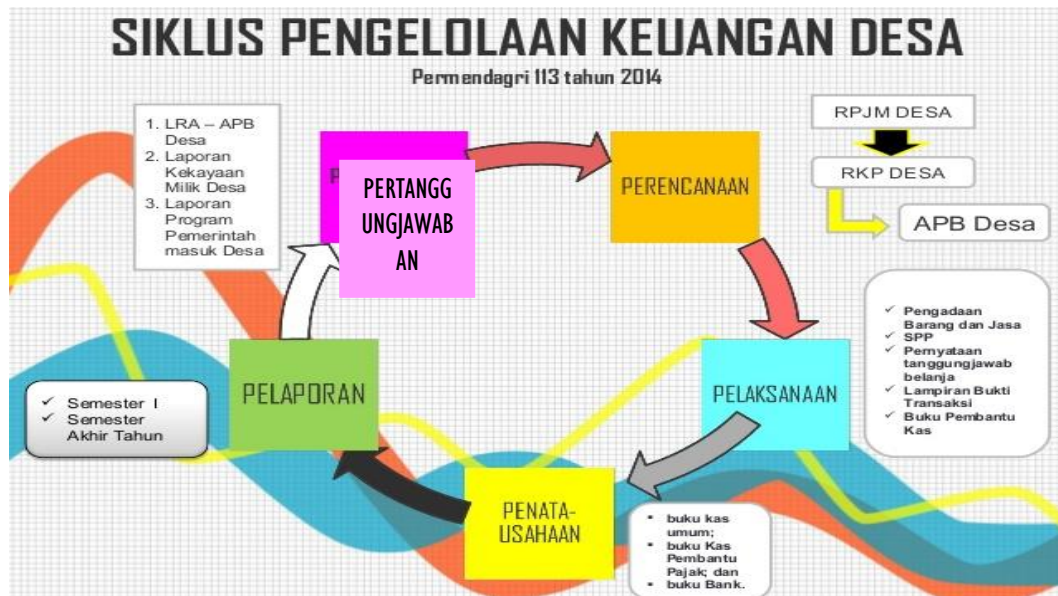
### **2.2.5. Tahapan Pengelolaan Dana Desa**

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015), akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di Desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, “Pengelolaan keuangan Desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa didalam hal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).” Siklus pengelolaan keuangan Desa terlihat pada Gambar 2.4.

Dana Desa (DD) termasuk ke dalam jenis dana transfer yang akan dilaporkan dan ABPDesa, maka tahapan yang akan dilakukan tidak akan jauh berbeda dengan pembuatan APBDesa. Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas (Permendagri Nomor 20/2018). Basis Kas adalah pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

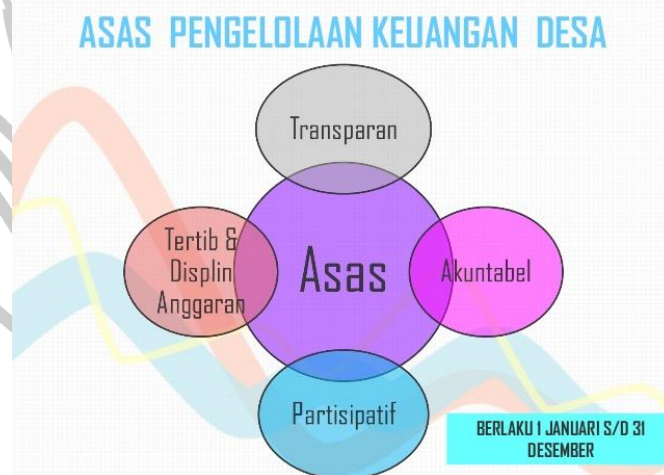
Pengelolaan keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran seperti yang terlihat dalam Gambar 2.5.



Sumber: <http://wonokromo.desakupemalang.id/>

Gambar 2.4  
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



Sumber: <https://www.google.com/>

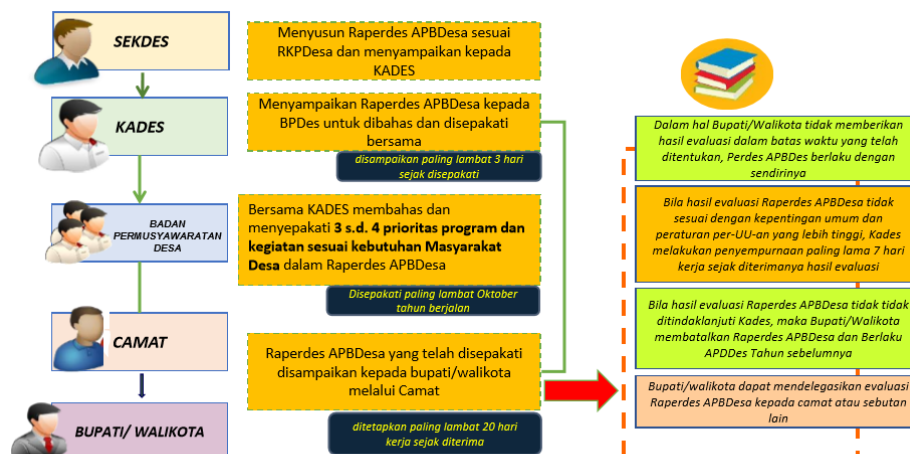
Gambar 2.5  
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Asas transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang

keuangan desa. Asas akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Asas tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

### **Tahap Perencanaan**

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. RKP Desa dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), RPJMDes sendiri merupakan rencana untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan untuk penyusunan rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes. Sekdes akan menyampaikan hasilnya Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APBDes kepada Kepala Desa.



Permendagri No.113 Tahun 2014 ps 20 sd 23

Sumber: Buku Saku Dana Desa

Gambar 2.6  
TAHAP PERENCAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kepala Desa akan menyampaikan Raperdes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. BPD bersama Kepala Desa membahas dan menyepakati 3 sampai dengan 4 prioritas program dan kegiatan sesuai kebutuhan Masyarakat Desa dalam Raperdes APBDesa. Program kegiatan tersebut merupakan usulan dari masyarakat Desa yang disampaikan dan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbangdes).

Musrenbangdes dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Lembaga masyarakat Desa, dan tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat. Kesepakatan kegiatan tersebut paling lambat akhir bulan Oktober tahun berjalan. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, maka Kepala Desa akan menyiapkan Raperdes mengenai penjabaran APB Desa dan Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Raperdes tersebut.

Raperdes yang telah disiapkan akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:

1. Surat pengantar,
2. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa,
3. Peraturan Desa mengenai RKP Desa,
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa,
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan (jika tersedia),
6. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal (jika tersedia), dan
7. Berita acara hasil musyawarah BPD.

Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Raperdes tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain serta mengundang Kepala Desa dan/atau Aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Raperdes tentang APB Desa. Raperdes tentang APB Desa yang telah dievaluasi maka akan ditetapkan dan dijalankan oleh Kepala Desa sebagai Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Informasi APB Desa yang telah ditetapkan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi yang disampaikan paling sedikit memuat APB Desa, pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan alamat pengaduan.

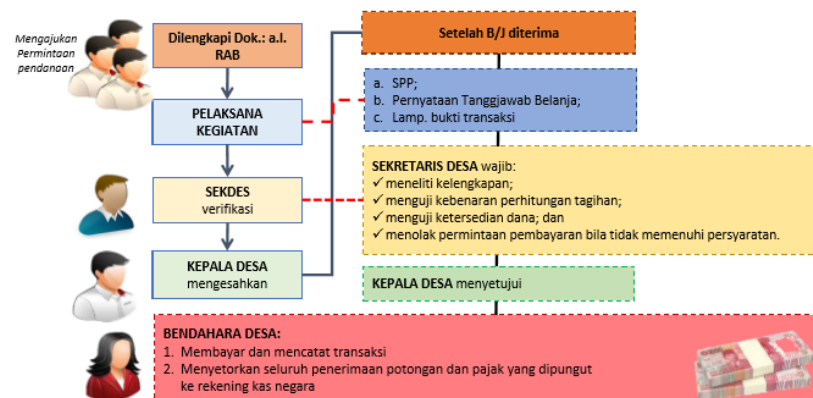
### Tahap Pelaksanaan



#### PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA DESA DALAM APBDesa



Mekanisme pencairan Dana Desa di Desa diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi dokumen, dan setelah itu dilakukan pengesahan dan persetujuan oleh Kepala Desa.



Sumber: Buku Saku Dana Desa

Gambar 2.7

#### TAHAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran Desa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semua penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Jika suatu Desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.



Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Nomor rekening kas Desa tersebut dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota. Selanjutnya Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan tersebut digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Kepala Desa akan menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Rencana Kerja Kegiatan Desa merinci volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Rencana anggaran Biaya merinci satuan untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Berikutnya Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA dan akan disahkan serta disetujui oleh Kepala Desa.

Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Rancangan RAK tersebut disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, Sekretaris Desa akan memverifikasi Rancangan RAK tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk diverifikasi Kepala Desa. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer dan pendapatan lain yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Arus kas keluar merupakan semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung dengan bukti lengkap dan sah. Bukti belanja tersebut juga harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran belanja atas beban APB Desa tersebut. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Kaur dan Kasi atau yang dikenal dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. TPK akan melakukan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia jasa, namun yang diutamakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah swakelola. Swakelola dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material

atau bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Standar ketentuan pengadaan barang atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang atau jasa yang dibuat oleh Bupati/Wali Kota.

TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), nominalnya sama besar atau kurang dari yang tertera. Pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Kaur Keuangan akan membayarkan kebutuhan untuk setiap kegiatan selaku Bendahara, jadi jika TPK kedatangan membawa dana maka wajib mengembalikan dana sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan di dalam kas Desa. Kaur Keuangan akan mencatat pengeluaran anggaran tersebut dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

#### **Tahap Penatausahaan**



Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Tahap penatausahaan ini dilakukan dengan cara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum dan ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan bukti transaksi.

Gambar 2.9 menunjukkan tahap penatausahaan serta pelaksana dan tanggungjawab yang harus dilakukan dalam pemenuhan penatausahaan keuangan Desa.



### PENATAUSAHAAN APBDes

Penatausahaan APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Desa.

APARAT DESA	TANGGUNGJAWAB	INSTRUMEN/ ALAT
 <b>Pelaksana Kegiatan</b>	Mencatat pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.	Buku pembantu kas kegiatan
 <b>Bendahara Desa</b>	<p>Melakukan pencatatan setiap penerimaan &amp; pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib</p> <p>Mempertanggungjawabkan uang</p> <p>Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 setiap bulan</p>	<p>1. Buku kas umum</p> <p>2. Buku kas pembantu pajak</p> <p>3. Buku bank</p> <p>4. Bukti Transaksi : Kuitansi, Nota, Faktur, Memo Internal, Nota Debit, Nota Kredit</p>



Permendari No113 Tahun 2014 pasal 35-36

Sumber: Buku Saku Dana Desa

Gambar 2.8

### TAHAP PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit. Buku kas umum juga digunakan untuk mencatat mutase perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum bisa dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi, semua transaksi yang telah dilakukan untuk awalnya dicatat pada buku kas umum kemudai mencatatnya dibuku pembukuan masing-masing. Format buku kas umum digambarkan pada Gambar 2.10.

Buku Pembantu Bank digunakan untuk membantu buku kas umum. Buku pembantu Bank mencatatkan penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank atau uang yang diterima atau disetorkan melalui Bank. Format

BUKU KAS UMUM  
DESA X  
TAHUN ANGGARAN 20XX

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)

Saldo Kas Desa per 30 Januari 20XX sebesar Rp XXX

Terdiri dari:

a.	Tunai	Rp XXX	(Lihat di saldo buku kas harian pembantu)
b.	Saldo Bank	Rp XXX	(Lihat di saldo buku bank)

..... 20XX

Mengetahui,  
Kepala Desa

Kaur Keuangan

Sumber: V. Wiratna Sujarweni

Gambar 2.9  
BUKU KAS UMUM

buku pembantu Bank terlihat pada Gambar 2.11. Sejatinya penerimaan Desa dapat disetorkan ke rekening Desa dengan cara, sebagai berikut:

1. Disetorkan langsung ke Bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
2. Disetorkan melalui Bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan
3. Disetorkan melalui Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang

BUKU BANK DESA  
 DESA ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

BULAN :  
 BANK CABANG :  
 REK. NO. :

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI									
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF									

MENGETAHUI  
 KEPALA DESA,

tanggal .....  
 BENDAHARA DESA,

Sumber: V. Wiratna Sujarweni

Gambar 2.10  
BUKU PEMBANTU BANK

diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas APB Desa untuk kegiatan melalui penyedia barang atau jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Kuintansi pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan, sedangkan kuintansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.

Buku kas umum juga mencatat pajak baik yang dipotong maupun yang disetorkan. Buku pembantu pajak membantu buku kas umum dalam hal catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak. Dana yang dipotong atau dipungut pajak maka Kaur Keuangan akan mencatat transaksi tersebut dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan. Nilai potongan atau pungutan pajak didasarkan pada bukti kuintansi yang sah. Ketika Kaur Keuangan melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Kaur Keuangan akan mencatat transaksi tersebut dalam Buku Pembantu Pajak pada kolom pengeluaran.

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Buku Pembantu Panjar (BPP) secara sederhana sudah diganti dengan Buku Pembantu Kegiatan yang dikelola Pelaksana Kegiatan.

### BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
JUMLAH					

Mengetahui,  
Kepala Desa

..... 20XX

Bendahara Desa

Sumber: V. Wiratna Sujarweni

### Gambar 2.11 BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

Buku pembantu kegiatan ini sebagai akumulasi yang menggambarkan realisasi belanja serta dapat dilihat pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Buku Kas Pembantu kegiatan mencatat penerimaan yang diperoleh dari Kaur Keuangan Desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) yang telah dirupiahkan.

Pengeluaran dicatat oleh Pelaksana Kegiatan atas belanja-belanja yang telah dilaksanakan baik berupa belanja barang atau jasa maupun belanja modal. Saldo yang masih tersisa dan berada di pelaksana kegiatan, maka dana tersebut harus disetorkan kepada Kaur Keuangan Desa. Hal tersebut dikarenakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak boleh menyimpan uang, jadi semua transaksi

dibayarkan atau disetorkan oleh Kaur Keuangan. Hal yang perlu menjadi catatan adalah semua penerimaan dan pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang sah dan lengkap, tidak hanya pengeluaran tetapi termasuk juga penerimaan. Bukti penerimaan yang perlu dibuat oleh pelaksana kegiatan berupa tanda terima swadaya berupa barang dan daftar hadir untuk tenaga atau gotong royong.

**BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**  
**DESA ..... KECAMATAN.....**  
**TAHUN ANGGARAN.....**

1. Bidang :  
 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

Desa.....  
 ....., Tanggal.....  
 Pelaksana Kegiatan

Sumber: Lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

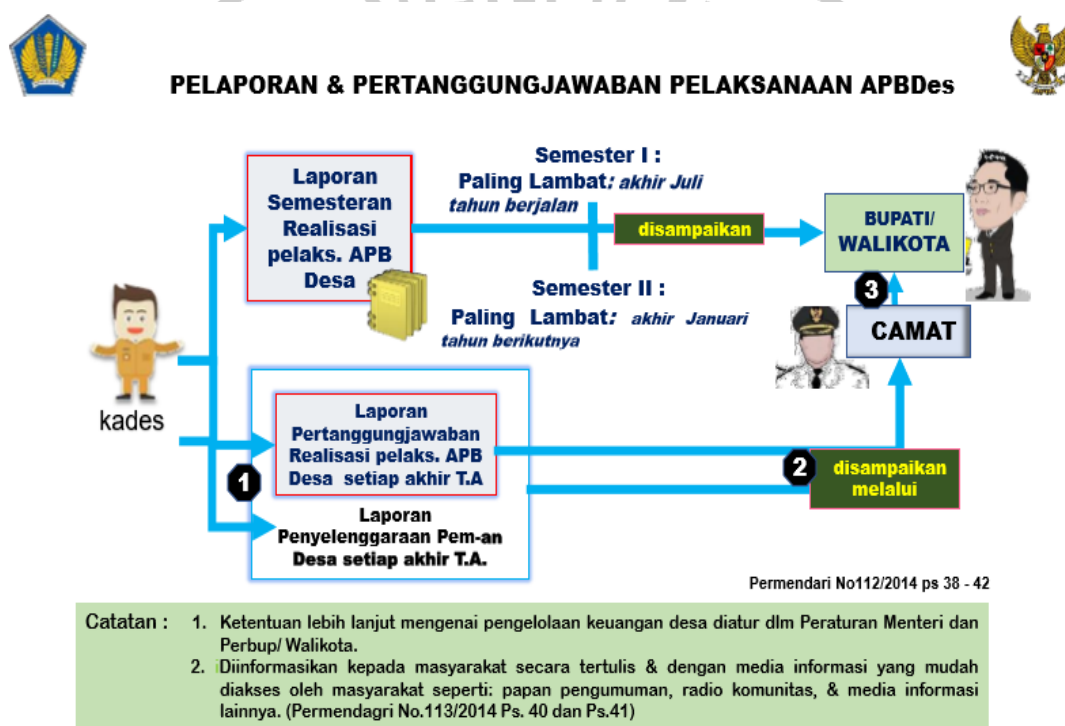
Gambar 2.12  
**BUKU PEMBANTU KEGIATAN**

Buku kas umum berisi hasil transaksi penerimaan ataupun pengeluaran Desa, Kaur Keuangan Desa wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Laporan tersebut dikemas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dikenal dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban). SPJ dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa akan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan tersebut. Hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis tersebut akan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.



## Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan Kepala Desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Alur atau siklus pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa ada pada Gambar 2.13.



Sumber: Buku Saku Dana Desa

Gambar 2.13  
TAHAP PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pada tahap pelaporan Kepala Desa akan menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan

semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya pihak Bupati/Wali Kota akan menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

### **Tahap Pertanggungjawaban**

Pada tahap pertanggungjawaban Kepala Desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

#### **2.2.6. Transparansi**

Menurut Baldric Siregar (2015:13) transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparan adalah prinsip menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,

proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (V. Wiratna, 2015). Transparansi juga dapat diartikan sebagai keterbukaan atas suatu tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Keterbukaan yang dimaksud di sini adalah seberapa besar akses informasi keterbukaan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) yang dapat diakses oleh masyarakat atau warga Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hak dari masyarakat Desa antara lain meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik (Bappenas dan Depdagri, 2002:18). Prinsip dari transparansi yaitu dengan meningkatkan kepercayaan antara pemerintahan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi juga harus seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan suatu lembaga maupun informasi-informasi yang bisa mempengaruhi hak privasi individu tertentu.

Keterbukaan juga akan membawa dampak terhadap kontrol dari masyarakat yang mungkin saja ditanggapi secara berlebihan. Maka dari itu transparansi juga harus dibatasi dengan kriteria pembatas seperti menganalisis jenis informasi yang akan disampaikan serta untuk siapa informasi tersebut ditujukan. Walaupun ada batasan penyampaian informasi namun tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat desa harus mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan desa.

Transparansi bisa diwujudkan dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan Pemerintah Desa, BPD, atau perwakilan tokoh masyarakat desa pada tahap perencanaan DD yang tercantum dalam APBDesa. Keterlibatan masyarakat ini mampu membangun kepercayaan masyarakat dan kegiatan gotong-royong antara masyarakat dengan pemerintah desa juga merupakan salah satu kegiatan yang meningkatkan transparansi. Sehingga dengan begitu terjalin hubungan baik, disamping itu kegiatan gotong-royong juga bisa diakui sebagai pendapatan desa sebagaimana yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, menjelaskan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Adanya prinsip transparansi ini diharapkan mampu menjamin akses akan

kebebasan bagi warga atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan yang ada di daerah mereka.

Informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat mengenai pengelolaan keuangan bisa mencakup tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Transparansi menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### **2.2.7. Akuntabilitas**

Menurut Baldric Siregar (2015:76) akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12 Tahun 2014 akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif/suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban. Menurut Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpendapat sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawab secara periodik.”

Maka dari itu, akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa bisa diartikan sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa atas sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam dan sumber daya keuangan. Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan keuangan desa setiap periodenya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Akuntabilitas publik terdiri dari atas 2 macam menurut Mardiasmo (2009:21) antara lain:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) Kepala Pemerintah Daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat kepada MPR.

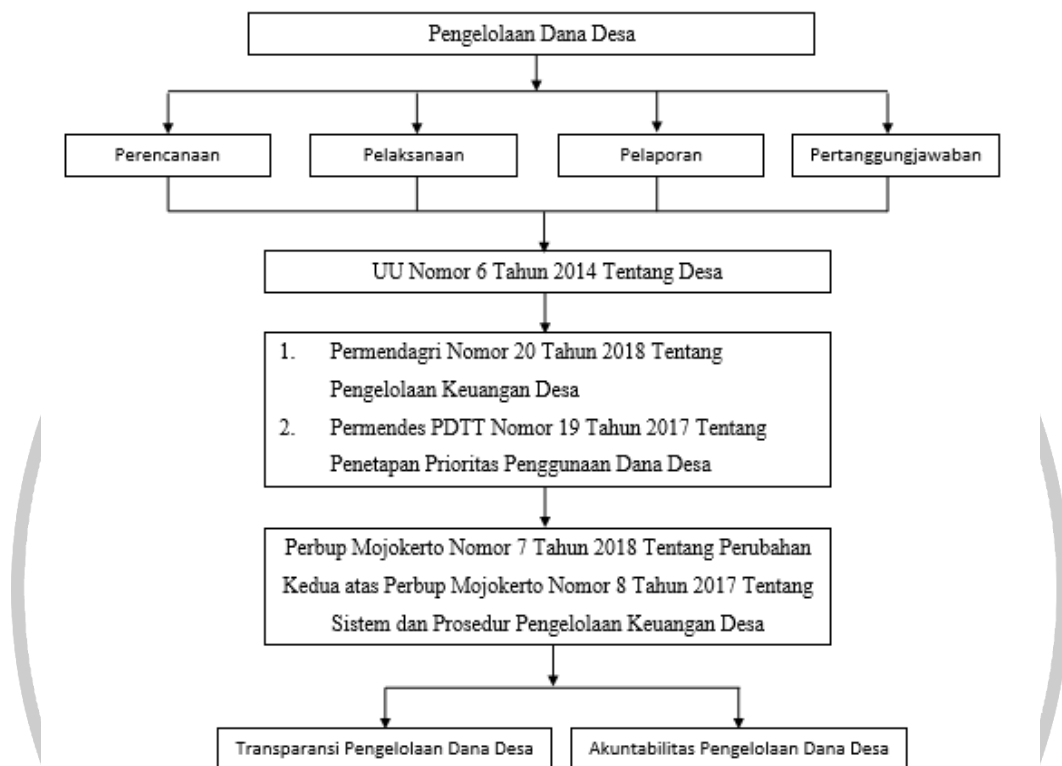
2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi dalam penelitian ini bagaimana Pemerintah Desa dalam mempertanggungjawabkan atas keuangan desa kepada masyarakat.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu prinsip dasar atau azas pengelolaan keuangan yang harus

dipenuhi oleh semua entitas, terutama dalam sektor publik. Dalam pengelolaan Dana Desa (DD) transparansi dan akuntabilitas akan terlihat setelah kita mengetahui pengelolaan Keuangan Desa Mlirip.



Sumber: diolah tahun 2019

Gambar 2.14  
KERANGKA PEMIKIRAN

Tahap atau proses yang telah dijalankan untuk mengelola Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa Mlirip disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Jika kita memahami setiap langkah dari pedoman-pedoman yang mengaturnya, mulai peraturan tentang Desa hingga pengelolaannya akan terlihat bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan.

Upaya penerapan asas transparansi akan terlihat dari tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) oleh Pemerintah Desa. Pemenuhan asas akuntabilitas akan terlihat pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemahaman penerapan kedua prinsip tersebut bisa juga berbeda untuk setiap Aparat Desa. Perbedaan pemahaman Tugas Pokok dan Fungs (Tupoksi) masing-masing akan menunjukkan tingkat transparan dan akuntabel pengelolaan Dana Desa.

Praktik pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Mlirip mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabn akan dianalisa kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendes PDTT Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Hasil analisa berdasarkan peraturan tersebut akan disesuaikan kembali dengan Perbup Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Perbup Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Jika praktik pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 telah dianalisa berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka akan terlibat bagaimana penerapan asas transparansi dan akuntabilitasnya.